

**LAPORAN**  
**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**PENYULUHAN PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM  
PENGAWASAN TERHADAP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS  
PEMERINTAHAN DI KELURAHAN JOHAR BARU**

Tim Pelaksana :

Dr. Hidayat Muchtar, M.Si

Fitri Mardjuki Achmadi, SE., MM

**INSTITUT ILMU SOSIAL DAN MANAJEMEN STIAMI**

**2015**

## HALAMAN PENGESAHAN

**Judul** : Penyuluhan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintahan Di Kelurahan Johar Baru

### Pelaksana

**Ketua**  
Nama Lengkap : Dr.Hidayat Muchtar, M.Si  
NIDN : 0005046011

**Anggota**  
Nama Lengkap : Fitri Mardjuki Achmadi, SE., MM  
NIDN : 0316086905

**Sumber Dana** : Internal  
**Biaya dari LPPM** : Rp. 6.000.000,-

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ilmu Administrasi,

  
(Dr. Bambang Irawan, M.Si, MM)  
NIK : 200130580

Jakarta, 03 November 2015  
Ketua Pelaksana

  
(Dr.Hidayat Muchtar, M.Si)  
NIDN : 0005046011

Menyetujui, Kepala LPPM

  
  
(Dr. Ir. A. H. Rahadian, M.Si)  
NIK : 201219447

## PRAKATA

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada kami Tim PPM Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Stiami untuk melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat (PPM) sebagai salah satu pengejawantahan dari Tridharma Perguruan Tinggi. PPM yang dilaksanakan berjudul **Penyuluhan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintahan di Kelurahan Johar Baru.**

Kegiatan PPM tersebut dapat terlaksana berkat dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini perkenankanlah kami menyampaikan terima kasih kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Stiami
2. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Stiami
3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Stiami
4. Ketua Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Stiami
5. Berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah membantu terlaksananya kegiatan PPM ini.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini masih belum mencapai target ideal karena keterbatasan waktu dan dana yang tersedia. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, menurut kami perlu kiranya dilakukan kegiatan pengabdian masyarakat di lain waktu sebagai kelanjutan kegiatan tersebut. Namun demikian, besar harapan kami semoga PPM ini dapat memberikan manfaat, aamiin.

Jakarta, 03 November 2015

Tim Pelaksana PPM

## RINGKASAN

Maladministrasi banyak terjadi di berbagai instansi pemerintah di Indonesia. Hal ini membuat masyarakat sebagai pengakses maupun pengguna layanan publik semakin tidak nyaman dengan pelayanan yang diselenggarakan pemerintah sehingga hal tersebut memunculkan kepedulian masyarakat terhadap ketidakmaksimalan penyelenggaraan pelayanan publik.

Seperti halnya di Kelurahan Johar Baru. Kelurahan Johar Baru merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, dengan Luas Wilayah 1.19 Km<sup>2</sup>, terdiri atas 13,191 Kepala Keluarga (KK), 11 RW dan 174 RT. Berbagai upaya dan tindakan, masyarakat berusaha memberikan kritik serta sarannya demi terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) dan juga pelayanan publik yang maksimal. Adanya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik dirasakan masyarakat akan sangat membantu menciptakan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas dan juga dapat diakses semua lapisan masyarakat tanpa adanya diskriminasi dari pihak pemerintah

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan FGD/ Focus Group Discussion untuk mengidentifikasi penyelenggaraan pemerintahan yang sudah berjalan dan penyuluhan untuk mendapatkan materi tentang penyelenggaraan pemerintahan dengan transparansi dan akuntabilitas.

Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan, disarankan untuk memperpanjang durasi dan frekuensi sosialisasi, agar khalayak yang dituju atau peserta benar-benar dapat memahami standar pelayanan publik sehingga terbentuk *good governance* di Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Lebih baik lagi bila dilakukan pendampingan, sebagai Untuk memberikan motivasi kepada para penyelenggara pemerintah, dapat diadakan semacam perlombaan dan pemberian penghargaan bagi unit kerja yang berprestasi dan sanksi bagi yang kinerjanya rendah. Dilakukann upaya perbaikan secara terus menerus dan berkelanjutan, serta disesuaikan dengan perkembangan perubahan situasi dan kondisi.

**Kata Kunci:** Pemerintahan, Transparansi, Akuntabilitas

## DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Pengesahan.....	ii
Prakata.....	iii
Ringkasan.....	iv
Daftar Isi.....	v

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Analisis Situasi.....	1
B. Kajian Pustaka.....	2
C. Identifikasi dan Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Kegiatan.....	4
E. Manfaat Kegiatan.....	4

### **BAB II METODE KEGIATAN PPM**

A. Khalayak Sasaran.....	5
B. Metode yang Digunakan.....	5
C. Langkah-Langkah Kegiatan.....	5

### **BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN PPM**

A. Hasil Pelaksanaan Kegiatan.....	6
B. Pembahasan.....	6
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Kegiatan.....	6
D. Organisasi Pelaksana.....	6

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	8
B. Saran.....	8

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. Daftar Hadir
2. Sertifikat Kegiatan
3. Laporan Biaya

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Analisis Situasi**

Maladministrasi banyak terjadi di berbagai instansi pemerintah di Indonesia. Hal ini membuat masyarakat sebagai pengakses maupun pengguna layanan publik semakin tidak nyaman dengan pelayanan yang diselenggarakan pemerintah sehingga hal tersebut memunculkan kepedulian masyarakat terhadap ketidakmaksimalan penyelenggaraan pelayanan publik.

Seperti halnya di Kelurahan Johar Baru. Kelurahan Johar Baru merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, dengan Luas Wilayah 1.19 Km<sup>2</sup>, terdiri atas 13,191 Kepala Keluarga (KK), 11 RW dan 174 RT. Berbagai upaya dan tindakan, masyarakat berusaha memberikan kritik serta sarannya demi terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) dan juga pelayanan publik yang maksimal. Adanya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik dirasakan masyarakat akan sangat membantu menciptakan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas dan juga dapat diakses semua lapisan masyarakat tanpa adanya diskriminasi dari pihak pemerintah.

Tuntutan masyarakat akan perubahan pelayanan publik memaksa Pemerintah harus berupaya keras untuk melakukan perubahan terhadap kualitas pelayanan. Penyebabnya adalah masyarakat sering dikecewakan pada kualitas pelayanan yang kurang maksimal serta partisipasi masyarakat yang rendah. Masalah yang selama ini menjadi sorotan adalah upaya pemerintah memaksimalkan fasilitas terhadap pengaduan dan penyelesaian masalah rendahnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di berbagai instansi. Pemerintah tidak akan bisa mengoreksi mutu pelayanan yang diberikan oleh *street level bureaucracy* sebagai pihak yang melaksanakan kebijakan dan berhadapan langsung dengan masyarakat pengakses layanan publik.

Masyarakat sebagai pengakses pelayanan seharusnya dilihat sebagai subjek yang dapat menentukan jenis, proses serta kualitas layanan yang akan diakses. Namun, selama ini jarang ada kejelasan mengenai penanganan keluhan yang muncul dimasyarakat terhadap pihak penyelenggara pelayanan publik. Penanganan keluhan harus dilakukan oleh pihak penyelenggara dan pihak eksternal sebagai bagian dari pengawasan. Kumorotomo mengemukakan, “kriteria untuk menilai pelayanan publik salah satunya adalah daya tanggap

untuk mempertanggungjawabkan secara transparan tentang kebutuhan vital masyarakat dalam pelayanan publik”. Responsivitas sangat diperlukan dalam pelayanan publik untuk memperlihatkan sebuah organisasi mampu menempatkan pelayanannya sesuai kebutuhan masyarakat dan menempatkan masyarakat sebagai prioritas dalam aktivitas pelayanannya.

Adanya responsivitas sebuah organisasi terhadap kebutuhan masyarakat tentu saja hal ini akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upayanya untuk ikut serta berperan dalam mengawasi pelayanan publik. Banyaknya keterbatasan ruang publik yang mampu diakses masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya justru membuat masyarakat enggan untuk ikut berpartisipasi. Selain karena keberadaan ruang aspirasi publik yang kurang, masyarakat juga mengalami kesulitan ketika hendak menyampaikan aspirasinya baik berupa kritik, saran, keluhan hingga laporan. Kebanyakan kesulitan-kesulitan yang dihadapi masyarakat adalah belum adanya ruang aspirasi publik, jarak yang jauh antara tempat tinggal dengan lembaga pengawasan eksternal, media yang harus digunakan serta mekanisme yang harus mereka jalani untuk bisa menyampaikan keluhan dan juga laporan terkait maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

## **B. Kajian Pustaka**

### **Transparansi**

Menurut Dwiyanto (2008), transparansi tidak hanya penting dalam penyelenggaraan pemerintahan tetapi juga dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Transparansi juga memiliki kontribusi yang sangat penting terhadap upaya penegakan hukum dan pemberantasan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dalam upaya pemberantasan KKN ini, peran transparansi menjadi sangat besar. Rendahnya transparansi sering memberi peluang dan kesempatan kepada para pemegang kekuasaan untuk menyalahgunakan kekuasaan. Mengingat Indonesia berada pada peringkat ke-90 terkorup dari seluruhnya 174 negara yang diperiksa (riset *Transparency International* 2016).

Berdasarkan Kajian Tren Korupsi tahun 2016 yang dirilis *Indonesian Corruption Watch* (ICW) pada 24 Februari 2016, modus korupsi yang jamak terjadi selama tahun 2016 adalah penyalahgunaan anggaran sebanyak 134 kasus dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 803,3 Miliar. Modus korupsi lain yang sering digunakan adalah penggelapan sebanyak 107 kasus dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 412,4 Miliar. Lalu diikuti dengan *mark*

up sebanyak 104 kasus, penyalahgunaan wewenang sebanyak 102 kasus dan laporan fiktif sebanyak 29 kasus.

Transparansi pelayanan publik merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Transparansi dalam penyelenggaraan meliputi :

Manajemen dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Transparansi manajemen meliputi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian oleh masyarakat.

## **Akuntabilitas**

### **Akuntabilitas Pelayanan Publik**

Penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada publik maupun kepada atasan/pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pertanggungjawaban pelayanan publik meliputi :

#### Akuntabilitas Kinerja pelayanan publik

- a. Akuntabilitas kinerja pelayanan publik dapat dilihat berdasarkan proses yang antara lain meliputi : tingkat ketelitian, profesionalitas petugas, kelengkapan sarana dan prasarana, kejelasan aturan dan kedisiplinan.
- b. Akuntabilitas kinerja harus sesuai dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan
- c. Standar pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, baik kepada publik maupun kepada atasan atau pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah. Apabila terjadi penyimpangan dalam hal pencapaian standar, harus dilakukan upaya perbaikan. Masyarakat melakukan penilaian terhadap kinerja pelayanan secara berkala. Disediakan mekanisme pertanggungjawaban bila terjadi kerugian dalam pelayanan publik.

#### Akuntabilitas Biaya Pelayanan Publik

- a. Biaya pelayanan dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.
- b. Pengaduan masyarakat yang terkait dengan penyimpangan biaya pelayanan publik, harus ditangani oleh Petugas/Pejabat yang ditunjuk berdasarkan surat Keputusan dari pejabat yang berwenang.

#### Akuntabilitas Produk Pelayanan Publik



- a. Persyaratan teknis dan administratif harus jelas dan dapat dipertanggung jawabkan dari segi kualitas dan keabsahan produk pelayanan.
- b. Prosedur dan mekanisme kerja harus sederhana dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Produk pelayanan diterima dengan benar, tepat dan sah.

### **C. Identifikasi dan Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam kegiatan ini adalah:

1. Bagaimana pemerintahan tingkat kelurahan dapat melaksanakan pemerintahan dengan meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas pelayanan meliputi prosedur, persyaratan teknis dan administratif, biaya, waktu, dan standar pelayanan.?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemeritahan dengan transparansi dan akuntabilitas?

### **D. Tujuan**

Kegiatan ini bertujuan :

1. Pemerintahan tingkat kelurahan dapat melaksanakan pemerintahan dengan meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas pelayanan meliputi prosedur, persyaratan teknis dan administratif, biaya, waktu, dan standar pelayanan.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemeritahan dengan transparansi dan akuntabilitas

### **E. Manfaat**

Manfaat kegiatan pengabdian masyarakat ini:

1. Pemerintahan tingkat kelurahan, khususnya Kelurahan Johar dapat melaksanakan pemerintahan dengan transparansi dan akuntabilitas, sehingga mencapai tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Menambah pengetahuan masyarakat untuk berpartisipasi.dalam pelaksanaan pemeritahan dengan transparansi dan akuntabilitas?

## **BAB II**

### **METODE KEGIATAN PPM**

#### **A. Khalayak Sasaran**

Khalayak sasaran pada kegiatan PPM ini adalah pegawai kelurahan. Pada kegiatan pengabdian masyarakat ini, pegawai Kelurahan Johar Baru. Selain itu, adalah masyarakat Kelurahan Johar Baru yang diwakili masyarakat setiap RT satu orang, sehingga terdapat 174 orang peserta.

#### **B. Metode yang Digunakan**

Metode yang digunakan adalah penyuluhan, yang terdiri atas dua macam penyuluhan, yakni penyuluhan untuk pegawai kelurahan sebagai penyelenggara pemerintahan dan penyuluhan untuk masyarakat sebagai partisipan.

#### **C. Langkah-langkah Kegiatan**

##### **1. FGD/ Focusing Group Discussion**

Merupakan kegiatan diskusi bersama masyarakat di organisasi masyarakat atau komunitas yang telah ditentukan oleh mitra lokal. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan yang terjadi di komunitas masyarakat tersebut, sehingga mitra lokal bisa menentukan persoalan atau sektor yang kira-kira paling relevan dan objektif dalam pelaksanaan pemerintahan. Dengan kegiatan ini, dapat diketahui kebutuhan di Kelurahan Johar Baru untuk dapat dijadikan materi penyuluhan sebagai tahap lanjutan dari kegiatan FGD ini.

##### **2. Penyuluhan**

Merupakan upaya menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan dengan transparansi dan akuntabilitas yang baik. Kegiatan ini terbagi menjadi dua macam, untuk pegawai kelurahan dalam hal ini Kelurahan Johar Baru dan untuk masyarakat yang diwakili setiap RT di Kelurahan Johar Baru

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN KEGIATAN PPM**

#### **A Hasil Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan dilaksanakan selama 2 hari. Berikut adalah rincian pelaksanaan kegiatan

##### Kegiatan hari 1

1. FGD yang dibagi dalam kelompok, dengan maksimal anggota kelompok 10 orang

2. Penyuluhan materi 1:

Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Menjunjung Nilai Transparansi dan Akuntabilitas

##### Kegiatan hari 2

1. Penyuluhan materi 2:

Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparansi dan Akuntabilitas.

2. Diskusi kasus di kelurahan

#### **B. Pembahasan**

Kegiatan dua hari berlangsung dengan lancar. Peserta mengikuti kegiatan dengan antusias. Pada saat FGD, semua peserta sebagai perwakilan setiap RT Kelurahan Johar Baru aktif menyampaikan pendapatnya.

Materi tentang penyelenggaraan pemerintahan dengan transparansi dan akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah, mampu diserap oleh peserta. Hal ini ditunjukkan dari daftar pertanyaan yang diberikan sebelum dan sesudah kegiatan berlangsung

#### **C. Faktor Pendukung dan Penghambat Kegiatan**

##### Faktor Pendukung

1. Kepemimpinan Lurah yang mendukung seluruh kegiatan yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan yang transparansi dan akuntabilitas

2. Motivasi masyarakat yang tinggi dalam mengikuti kegiatan ini.

##### Faktor Penghambat

Waktu pelaksanaan yang terbatas, sedangkan masih banyak hal yang ingin diketahui, baik oleh pegawai kelurahan, maupun masyarakat Kelurahan Johar Baru.

#### **D. Organisasi Pelaksana**

Kegiatan dilakukan oleh Tim Dosen Administrasi Publik.

Ketua : Hidayat Muchtar

Anggota : Fitri Mardjuki Achmadi

Sedangkan tim narasumber kegiatan penyuluhan berasal dari dosen Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Stiarni: Dr. Bambang Irawan.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Secara umum, kegiatan berlangsung dengan baik, dihadiri oleh pegawai kelurahan terkait pelayanan dan perwakilan masyarakat dari setiap RT di Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Peserta mampu mengikuti FGD dengan antusias dan memahami materi yang disosialisasikan tentang pelayanan publik dan standar pelayanan publik.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan, disarankan untuk memperpanjang durasi dan frekuensi sosialisasi, agar khalayak yang dituju atau peserta benar-benar dapat memahami standar pelayanan publik sehingga terbentuk good governance di Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Lebih baik lagi bila dilakukan pendampingan, sebagai

Untuk memberikan motivasi kepada para penyelenggara pemerintah, dapat diadakan semacam perlombaan dan pemberian penghargaan bagi unit kerja yang berprestasi dan sanksi bagi yang kinerjanya rendah. Dilakukann upaya perbaikan secara terus menerus dan berkelanjutan, serta disesuaikan dengan perkembangan perubahan situasi dan kondisi.

### Laporan Pembiayaan

No.	Uraian	Volume	Harga Satuan	Biaya
1.	Honorarium	2 hari	Rp 500.000,00	Rp. 1.000.000,00
2.	Sewa Peralatan: <i>System</i>	2 hari	Rp. 100.000,00	Rp. 200.000,00
3.	Penggandaan proposal	10 eksemplar	Rp. 150.000,00	Rp 150.000,00
4.	Konsumsi 2 hari	200 orang	Rp. 20.000,00	Rp 4.000.000,00
5.	Transport 2 hari	5 orang	Rp. 100.000,00	Rp 500.000,00
6.	Penggandaan laporan	10 eksemplar	Rp. 15.000,00	Rp. 150.000,00
<b>JUMLAH</b>				<b>Rp. 6.000.000,00</b>